

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dasar pemikiran dalam memilih studi-studi terdahulu adalah untuk menelusuri secara sistematis bagaimana penelitian sebelumnya membahas isu politik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan politik dinasti, legitimasi kekuasaan, framing media, dan wacana pemakzulan.

Abdul Rojak (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Wacana Perjalanan Gibran Rakabuming Ditetapkan Menjadi Cawapres 2024 Menggunakan Teori Teun A. Van Dijk, meneliti struktur teks berita dari media daring Detik.com dan Kompas.com. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga struktur utama dalam wacana pemberitaan, yakni struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur, dengan perbedaan topik dan sudut pandang yang mengarah pada penonjolan ideologi tertentu dalam membingkai pencalonan Gibran (Rojak, 2023).

Pana Pramulia, Hari Bakti Mardikantoro, dan Rustono (2024) dalam artikel berjudul Representation of Fufufafa Issue in Public Discourse: A Study of Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis, mengungkap bahwa isu Fufufafa di media sosial dan media massa dimanfaatkan oleh aktor dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menyebarkan narasi ideologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa

Media sosial mempercepat polarisasi publik dan menciptakan opini yang dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan. (Pramulia et al., 2024).

Rafli Iftikar dan Haris Shofiyuddin (2024) melalui studi mereka yang berjudul *Wacana pada Berita Online Jokowi Soal Gibran Politik Dinasti: Yang Coblos Rakyat, Bukan Elit*, menggunakan pendekatan studi kasus komparatif untuk menyoroti bagaimana CNN Indonesia membentuk narasi mengenai politik dinasti. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemberitaan media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terhadap pencalonan Gibran, dan menunjukkan keberpihakan terselubung melalui konstruksi wacana. (Iftikar & Shofiyuddin, 2024).

(Marlene & Kho, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Echoes of Allegiance: Analisis Framing Berita Keberpihakan Jokowi oleh Tempo dan VIVA Group*, membandingkan framing berita oleh dua media besar terhadap keberpihakan politik Jokowi. Penelitian ini menemukan bahwa Tempo dan VIVA membingkai berita dengan cara berlawanan yang menciptakan persepsi berbeda di masyarakat, mempertegas peran media dalam membentuk realitas politik. (Marlene & Kho, 2025).

Anatia Simamora dan Syifa Syarifah Alamiyah (2025) dalam artikel berjudul *Resepsi Berita Pemakzulan Presiden Jokowi pada Portal Berita Tempo.co*, menggunakan analisis resepsi untuk mengkaji bagaimana pembaca menerima pemberitaan tentang isu pemakzulan Jokowi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mayoritas pembaca menilai Tempo tidak netral dan cenderung berpihak,

dengan sebagian besar responden berada pada posisi dominan-hegemoni menurut klasifikasi Stuart Hall (SIMAMORA & SYIFA, 2025a)

Kurnia Kusumawati, Dewi Kusumaningsih, dan Muhlis Fajar Wicaksana (2024) dalam penelitian mereka berjudul Representasi Perempuan dalam Pemberitaan Puan & Megawati di Instagram, menemukan bahwa representasi perempuan dalam media sosial menunjukkan ketimpangan posisi subjek dan objek yang cenderung bias gender. Analisis dengan pendekatan Sara Mills menunjukkan bahwa Media secara implisit mengkonstruksi posisi perempuan dalam ranah politik dengan berbagai bentuk representasi linguistik yang membentuk stereotip. (Kusumawati et al., 2024).

Ari Kurnia, Rangga Fadhill, dan Ildan Dziqri (2024) melalui studi berjudul Propaganda Politik dalam Media Melalui Artikel Berita pada Kanal Sorot Politik di Kompas.com, menyatakan bahwa kanal berita Sorot Politik di Kompas.com secara aktif membingkai isu politik sesuai dengan kepentingan bisnis, namun tetap mengikuti prosedur hukum dari KPU. Penelitian ini menunjukkan bahwa Media dapat menjadi sarana propaganda politik yang tersembunyi melalui pemberitaan yang tampak netral. (Kurnia et al., 2024).

Azwar, Rizki Pratama Putra, dan Uljanatunnisa (2021) dalam penelitiannya berjudul Unsur Keberpihakan Pada Pemberitaan Media Online, Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kampanye pada Kumparan.com meneliti bagaimana media memberitakan kampanye pasangan calon presiden 2019. Dengan menggunakan

analisis wacana kritis model Norman Fairclough, penelitian ini menunjukkan bahwa Kumparan.com secara halus menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf melalui pemilihan kata dan konstruksi naratif dalam berita, meskipun secara eksplisit media berupaya tampak netral. (Azwar et al., 2021).

Muhamad Faridh dan Slamet Parsono (2024) dalam penelitian berjudul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Viva.co.id dan Tempo.co terhadap Pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 menganalisis perbedaan framing yang digunakan dua media besar tersebut. Dengan menggunakan model analisis Van Dijk (struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur), hasilnya menunjukkan bahwa Viva.co.id cenderung membingkai narasi secara lebih simpatik terhadap Gibran dan keluarganya, sementara Tempo.co lebih menonjolkan aspek formal dan kritik politik terhadap proses pencalonan. (Faridh & Parsono, 2024)

Penelitian oleh Yusi Yustisian Adlah dan Agus Hamdani (2023) dalam Jurnal *Lingue* menyoroti pemberitaan online tentang pengusungan Gibran sebagai cawapres melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk. Meskipun tidak menggunakan teori Pan dan Kosicki, penelitian ini tetap relevan karena menunjukkan bagaimana media seperti Kompas.com dan Detik.com membentuk citra Gibran sebagai sosok yang dianggap tidak beretika politik, sementara PDIP diposisikan sebagai korban. Dalam konteks framing, dapat dianalisis bahwa struktur tematik dan skrip dalam pemberitaan tersebut diarahkan untuk menggiring opini pembaca agar bersimpati kepada PDIP. Perbedaan utama dengan penelitian ini

adalah fokus pada pencalonan, bukan pada dinamika pemakzulan (Adlah & Hamdani, 2023).



UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Judul	KonsepTeori	Hasil Penelitian	Metode, dan Informan	Keterbatasan / Rekomendasi
Analisis Wacana Perjalanan Gibran Rakabuming Ditetapkan Menjadi Cawapres 2024.  (Rojak, 2023)	Teori Wacana Kritis Van Dijk (struktur teks)	Berita di Detik dan Kompas dibingkai dengan struktur tematik yang menyoroti legitimasi MK, penggunaan lead dan headline menunjukkan struktur sintaksis yang memperkuat pesan utama.	Kualitatif, Van Dijk, tanpa informan.	Tambahkan dimensi retorik dan efek pembingkai pada persepsi publik.
Representation of Fufufafa Issue, in Public Discourse: A Study of Teun A. van  (Pramulia et al., 2024)	Hegemoni dalam CDA	Struktur retorik di media sosial dan online mengangkat isu Fufufafa untuk membentuk narasi negatif/positif terhadap Gibran. Framing muncul lewat visual dan narasi di headline.	Kualitatif, Van Dijk, konten medsos dan berita.	Perlu uji silang antara framing digital dan media mainstream secara komparatif.
Wacana Berita Jokowi Soal Gibran Politik Dinasti. (Iftikar &	Van Dijk	CNN Indonesia menampilkan <i>framing</i> yang membentuk opini politik	Studi kasus CNN; tanpa informan.	Disarankan mengintegrasikan respons publik atau dampak <i>framing</i> ke media sosial.

Shofiyyuddin, 2024)		dinasti terkait Gibran.		
Echoes of Allegiance: Analisis Framing Berita Keberpimpinan Jokowi oleh Tempo dan VIVA Group. (Marlene & Kho, 2025)	Teori <i>Framing</i> Pan dan Kosicki	Tempo menggunakan struktur tematik yang menonjolkan keberpimpinan Jokowi pada Gibran, sedangkan VIVA menekankan netralitas. Perbedaan tampak pada cara keduanya membingkai tokoh dan peristiwa melalui struktur retorik dan sintaksis.	Analisis <i>Framing</i> Pan dan Kosicki.	Tambahkan analisis pembandingan netizen/media sosial terhadap <i>framing</i> media.
Resepsi Berita Pemakzulan Jokowi di Tempo.co. (SIMAMORA & SYIFA, 2025b)	Teori Resepsi Stuart Hall	Tempo dianggap tidak netral, audiens mayoritas dominan-hegemonik.	Resepsi audiens; pembaca Tempo.	Perlu integrasi dengan <i>framing</i> berita untuk melihat hubungan media dan resepsi.
Representasi Perempuan dalam Pemberitaan Puan & Megawati. (Kusumawati et al., 2024)	Wacana Gender Sara Mills	Media menunjukkan bias gender lewat posisi subjek dan narasi.	Sara Mills; konten Instagram.	Perluas sumber ke media arus utama (portal berita nasional).

Propaganda Politik dalam Kanal Sorot Politik Kompas.com. (Kurnia et al., 2024)	Propaganda, Komunikasi Politik	Kompas tampilkan propaganda politik yang dibungkus netral.	Studi kasus; informan editor Kompas.	Tambahkan analisis retorik dalam artikel untuk menilai gaya persuasi.
Keberpilihan Media pada Kampanye Kumparan.com. (Azwar et al., 2021)	CDA <i>Fairclough</i> (3 dimensi)	Kumparan lebih condong ke Jokowi-Maruf secara simbolik.	CDA <i>Fairclough</i> (3 dimensi)	Tambahkan aspek tematik konflik dan konstitusi dalam berita politik.
Analisis Wacana Kritis Viva.co.id dan Tempo.co terhadap Gibran. (Faridh & Parsono, 2024)	Wacana Kritis Van Dijk	Viva menyuarakan simpati, Tempo kritis terhadap Gibran.	Kualitatif, Van Dijk; 4 berita.	Rekomendasikan eksplorasi retorika visual (gambar, <i>headline</i> , <i>layout</i> ).
Struktur Teks, Kognisi dan Konteks Sosial dalam Berita <i>Online</i> Mengenai Pengusungan Gibran". (Adlah & Hamdani, 2023)	Teori Analisis Wacana Kritis Van Dijk: teks, kognisi sosial, konteks sosial.	Kompas.com dan Detik.com menggunakan struktur sintaksis dan tematik yang menggiring opini pembaca untuk bersimpati pada PDIP dan mengkritik Gibran.	Kualitatif deskriptif, artikel Kompas.com dan Detik.com.	Belum membahas efek <i>framing</i> pada persepsi publik. Rekomendasi : eksplorasi lebih luas pada media lokal dan platform digital.

**Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai pemberitaan seputar Gibran Rakabuming masih berfokus pada isu-isu seperti pencalonan politik, dinasti politik, representasi di media sosial, keberpihakan media terhadap Jokowi, serta analisis wacana terhadap isu-isu yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemakzulan. Beberapa studi sebelumnya juga lebih sering menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk, Framing Pan dan Kosicki, CDA Fairclough, maupun pendekatan resepsi untuk melihat bagaimana media membentuk makna terhadap peristiwa politik tertentu. Namun, seluruh penelitian tersebut masih terbatas pada satu atau dua media saja, seperti CNN Indonesia, Tempo.co, Viva.co.id, Kumparan.com, atau platform media sosial, sehingga cakupan analisisnya belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan konstruksi wacana antar media arus utama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus isu yang diangkat, yaitu pemberitaan mengenai pemakzulan Gibran, sebuah isu yang secara jelas belum pernah dianalisis dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Isu pemakzulan memiliki dinamika politik, hukum, dan komunikasi publik yang sangat berbeda dari isu pencalonan maupun dinasti politik, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan studi mengenai wacana politik di media Indonesia. Selain itu, penelitian ini secara simultan membandingkan tiga media daring arus utama dengan karakter kepemilikan dan orientasi editorial yang berbeda, yaitu Kompas.com, Tempo.co, dan Sindonews.com. Pemilihan tiga media ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai

bagaimana konstruksi framing dibentuk oleh perbedaan ideologi redaksi, kepemilikan media, serta posisi media dalam lanskap politik nasional.

Kebaruan berikutnya terletak pada pendekatan analitis yang digunakan. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian besar hanya memfokuskan analisis pada level struktur teks atau framing, penelitian ini melakukan pembacaan yang lebih integratif, yang tidak hanya melihat pola tematik dan sintaksis, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial-politik, kepentingan pemilik media, serta relasi kekuasaan yang melingkupi proses produksi berita. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana media membingkai isu pemakzulan Gibran, tetapi juga menelaah bagaimana kondisi politik dan kepentingan struktural media berperan dalam membentuk framing tersebut.

Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga aspek utama, Pertama, isu yang diteliti benar-benar baru dan belum pernah dikaji secara akademik. Kedua, perbandingan tiga media arus utama memberikan pemetaan pembingkai yang lebih luas dibanding penelitian sebelumnya, dan ketiga, pendekatan analitis yang lebih komprehensif memungkinkan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis maupun empiris yang lebih mendalam terhadap kajian framing media dan politik Indonesia.

## **2.2 Teori atau Konsep yang digunakan**

### **2.2.1. Konstruksi Realitas**

Teori konstruksi realitas berangkat dari pandangan bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang bersifat objektif dan apa adanya, tetapi dibentuk melalui proses

social, termasuk melalui bahasa, interaksi, dan terutama media massa. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi secara aktif mengonstruksi realitas melalui proses seleksi, penonjolan, dan pembingkaiian informasi.

Landasan utama teori konstruksi realitas dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya *The Social Construction of Reality* yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses dialektis yang meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merujuk pada proses ketika individu atau institusi mengekspresikan makna dan interpretasi subjektif ke dalam dunia sosial. Objektivasi terjadi ketika makna tersebut dilembagakan dan dianggap sebagai kenyataan yang objektif. Selanjutnya, internalisasi merupakan proses ketika individu menyerap realitas yang telah terobjektivasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan taken for granted (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks media, proses ini tampak ketika media memproduksi berita sebagai hasil interpretasi tertentu yang kemudian diterima publik sebagai realitas sosial.

Menurut (Eriyanto, 2012), berita yang diproduksi media bukanlah cerminan langsung dari peristiwa, melainkan hasil dari serangkaian keputusan redaksional mengenai aspek apa yang dianggap penting, relevan, atau layak diberitakan. Dengan demikian, media bertindak sebagai agen konstruksi yang menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh publik. Pendekatan konstruksionis juga menekankan bahwa realitas dibentuk melalui mekanisme simbolik dan interpretatif. Nuh (2019) menyatakan bahwa media memilih sumber, menentukan angle, dan menggunakan bahasa tertentu yang pada akhirnya menciptakan versi realitas yang berbeda dari apa

yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, (Muktiyo, 2015) menegaskan bahwa konstruksi media tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, orientasi politik, serta tekanan ideologis, sehingga produk pemberitaan sering kali merefleksikan bias tertentu.

Dalam perspektif komunikasi, konstruksi realitas melalui media semakin kompleks karena hadirnya platform digital. Media online bekerja dengan logika kecepatan, klik, algoritma, dan tren yang membentuk bagaimana sebuah isu ditampilkan. (Arifin, 2025) menjelaskan bahwa media digital melakukan konstruksi realitas secara lebih dinamis karena berita dapat diubah, diperbarui, atau dilengkapi kapan saja, membuat proses konstruksi berlangsung secara real-time.

Lebih lanjut, (Prastya, 2016) menggarisbawahi bahwa analisis terhadap konstruksi realitas memerlukan pemahaman mengenai struktur kekuasaan di balik media, termasuk bagaimana media mereproduksi atau menantang suatu wacana. Hal ini sejalan dengan paradigma konstruksionis yang memandang media sebagai medan produksi makna, tempat berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik saling berinteraksi. Dengan demikian, teori konstruksi realitas menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena membantu menjelaskan bagaimana isu pemakzulan Gibran dibentuk, ditentukan fokusnya, dan disajikan kepada publik oleh media Kompas.com dan Tempo.co. Proses konstruksi tersebut dapat dilihat melalui pilihan kata, penonjolan aspek tertentu, serta sudut pandang yang digunakan untuk memaknai peristiwa politik.

### **2.2.2. Framing dalam Pemberitaan Media**

Konsep framing berakar pada teori konstruksionisme sosial yang berpendapat bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial yang melibatkan bahasa, simbol, dan representasi media (Dharma, 2018). Aini & Setiawan (2021) menjelaskan bahwa analisis framing merupakan suatu pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana media, aktor politik, maupun kelompok-kelompok lain dalam memilih atau menelaah aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas untuk disorot, ditekankan, atau diinterpretasikan dalam penyajian informasi kepada masyarakat.

Media massa bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan juga sebagai agen yang aktif dalam membentuk dan mengonstruksi makna yang akan dipahami oleh audiens. Media memiliki kekuatan untuk menafsirkan dan mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap peristiwa atau fenomena tertentu melalui representasi yang mereka pilih untuk disorot. Media berperan dalam membentuk persepsi publik tentang realitas sosial yang ditampilkan (Adiwibowo & Larasati, 2025).

Framing dapat dipahami sebagai proses seleksi dan penekanan elemen-elemen tertentu dari suatu peristiwa atau isu dalam penyusunan pesan berita. Menurut (Widyaya & Setiawan, 2023) menjelaskan bahwa framing merupakan proses yang melibatkan pemilihan beberapa aspek dari suatu kenyataan yang dianggap relevan dan kemudian memberikan penekanan khusus pada aspek-aspek tersebut. Selanjutnya (Nurkomalasari & Setiawan, 2023) mengatakan bahwa hakikatnya framing

merupakan sebuah metode untuk melihat bagaimana cara sebuah media dalam bercerita atas sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di realitas. Proses ini bertujuan untuk menyusun definisi masalah, menginterpretasikan hubungan sebab-akibat, memberikan evaluasi moral, serta menawarkan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap isu yang dibahas. Framing tidak hanya memengaruhi apa yang disampaikan oleh media, tetapi juga bagaimana hal tersebut dipahami oleh audiens.

Framing dieksekusi melalui berbagai strategi naratif yang melibatkan pemilihan judul yang bersifat sugestif atau provokatif, struktur pemberitaan yang menempatkan informasi tertentu di bagian yang lebih menonjol, serta penyusunan kutipan dan visual yang mendukung narasi yang dibangun oleh media. Elemen-elemen tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta, tetapi juga untuk memengaruhi cara audiens menafsirkan fakta tersebut. Sebagai contoh, dalam pemberitaan politik, framing sering digunakan untuk membentuk citra seseorang atau kelompok, memperkuat ideologi tertentu, atau bahkan untuk mengarahkan opini publik terhadap kebijakan atau tindakan tertentu (Pamungkas et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penghubung informasi, tetapi juga sebagai kekuatan dalam pembentukan opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik dan sosial (Adiwibowo & Larasati, 2025).

Framing dalam konteks politik sangat penting untuk menganalisis bagaimana media membangun atau meruntuhkan citra seorang tokoh politik. Menurut (Pamungkas et al., 2024) menjelaskan bahwa framing berfungsi untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu politik dengan menonjolkan aspek

tertentu dan mengabaikan aspek lain yang tidak menguntungkan. Media dapat menyajikan tokoh politik dengan cara yang mendukung atau merugikan tergantung pada bagaimana framing dilakukan. Framing juga dapat mempengaruhi cara pandang publik terhadap kebijakan yang diusung oleh tokoh tersebut, serta persepsi mereka terhadap tindakan atau keputusan yang diambil (Prastya, 2016b).

Framing menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus politik yang kontroversial, di mana pemberitaan media berperan besar dalam membentuk opini publik tentang legitimasi proses hukum yang sedang berlangsung. Analisis framing dapat mengidentifikasi bagaimana media menyajikan narasi yang lebih besar di balik isu-isu tertentu, termasuk pemahaman tentang dinamika kekuasaan, etika, dan moralitas yang terlibat (Sovianti, 2019). Analisis ini memungkinkan untuk menggali lebih dalam bagaimana peristiwa tersebut disajikan, apa yang disorot dan apa yang diabaikan, serta bagaimana hal itu membentuk wacana publik seputar tokoh atau kebijakan tertentu. Pemahaman tentang framing bukan hanya penting untuk memahami konten media, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana media berperan dalam membentuk struktur kekuasaan sosial dan politik yang lebih luas. Framing memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mencatat realitas, tetapi juga mengkonstruksi realitas itu sendiri (Prastya, 2016b).

### **2.2.3 Framing Media Pan & Kosicki**

Model pembingkai framing yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi komunikasi massa yang fokus

pada bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui pemilahan, penekanan, dan pengorganisasian elemen-elemen berita (A. M. Siregar et al., 2023). (Gunawan & Setiawan, 2022) mengemukakan bahwa framing Pan dan Kosicki menempatkan framing sebagai bagian dari struktur wacana, bukan sekadar teknik penulisan, melainkan cara sistematis yang digunakan media untuk membingkai suatu peristiwa, tokoh, atau isu dalam bentuk narasi yang terorganisasi. Dengan menggunakan framing, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana media menonjolkan aspek tertentu, misalnya sisi hukum, politik, atau etika serta apa yang dikesampingkan dalam pemberitaan. Selain itu, teori ini juga membantu mengungkap bagaimana konstruksi wacana yang dibentuk media berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap isu pemakzulan tersebut, sehingga menjadikannya alat analisis yang tepat untuk memahami pola pemberitaan media online di Indonesia.

(A. M. Siregar et al., 2023) mengemukakan bahwa framing Pan dan Kosicki membagi struktur wacana berita menjadi empat bagian utama, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Pertama, struktur sintaksis merujuk pada bagaimana informasi disusun dalam bentuk narasi. Elemen-elemen seperti judul berita, lead, dan urutan penyajian informasi menjadi aspek penting dalam tahap ini. Kedua, struktur skrip menyangkut alur naratif dalam penyampaian berita, yaitu bagaimana suatu peristiwa dikisahkan dari awal hingga akhir. Pan dan Kosicki melihat berita sebagai narasi yang memiliki pola tertentu seperti pengenalan masalah, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ketiga, struktur tematik berfokus pada bagaimana tema-tema utama dalam berita dibingkai dan

disusun. Struktur ini menunjukkan perhatian media terhadap aspek tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Keempat, struktur retorik berhubungan dengan penggunaan gaya bahasa, metafora, kutipan, dan perangkat retorika lain yang dimanfaatkan untuk memperkuat bingkai berita.

### **2.3 Media Massa dan Berita di Media Online**

Media massa merupakan sarana komunikasi yang berfungsi menyebarkan pesan kepada khalayak luas secara simultan, dengan tujuan utama menyampaikan informasi, membentuk opini, menghibur, serta mempengaruhi perilaku sosial dan politik masyarakat (Sinaga, 2023b). Media massa dipandang sebagai agen penting dalam proses sosialisasi, pembentukan wacana publik, dan reproduksi budaya. Nida (2014) menjelaskan komunikasi massa merupakan suatu proses penyampaian pesan maupun informasi dari komunikator kepada audiens secara luas melalui saluran media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. (Habibie, 2018) menjelaskan bahwa media massa memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut Pertama, Media massa berfungsi sebagai pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan penglihatan masyarakat luas. Kedua, Media massa berfungsi melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan. Ketiga, Media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi kepada generasi lainnya. Sementara itu (Jaya & Zahara, 2022) menekankan bahwa media juga menjalankan fungsi hiburan dan mobilisasi masyarakat terhadap tujuan tertentu. Media massa tidak pernah netral karena ia beroperasi dalam kerangka

ideologis dan kepentingan ekonomi-politik tertentu, sehingga apa yang disampaikan oleh media merupakan hasil dari proses seleksi, penyusunan narasi, dan framing yang mencerminkan kekuasaan dan ideologi dominan.

Selain memahami fungsi media, penting pula untuk melihat bagaimana media mengemas informasi dalam bentuk berita. Berita merupakan laporan mengenai peristiwa yang memiliki nilai informasi, aktualitas, dan relevansi bagi masyarakat. Dalam konteks jurnalistik, berita tidak hanya merekam kejadian, tetapi merupakan hasil dari proses seleksi, interpretasi, dan konstruksi yang dilakukan oleh jurnalis serta institusi media. Sebuah peristiwa baru dapat dikategorikan sebagai berita apabila memenuhi kriteria nilai berita, seperti aktualitas, kedekatan, dampak, konflik, dan ketokohan (Arifin, 2025). Selain itu, berita juga harus memuat unsur 5W+1H (what, who, where, when, why, dan how) sebagai struktur dasar penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada era digital, berita mengalami transformasi di mana media online menekankan kecepatan publikasi, penggunaan judul yang menarik perhatian, serta penonjolan isu yang berpotensi meningkatkan klik dan keterlibatan pembaca. Dengan demikian, berita bukan hanya produk informasi, tetapi juga hasil pertimbangan profesional, ekonomi, dan algoritmik yang memengaruhi cara suatu isu dipresentasikan kepada publik.

Dalam pendekatan konstruksionis, media dipahami sebagai agen yang turut membentuk realitas sosial, bukan sekadar merefleksikannya. (Muktiyo, 2015) mengemukakan bahwa media tunduk pada kepentingan pemilik modal, iklan, sumber

berita dominan, serta tekanan ideologis yang membentuk bias sistemik dalam pemberitaan. Menganalisis isi media massa, penting untuk memperhatikan struktur kekuasaan di balik media, orientasi ideologis, serta bagaimana media mereproduksi atau menantang struktur sosial yang ada. Kajian terhadap media massa memerlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek komunikasi, sosiologi, politik, dan budaya, guna memahami bagaimana media menjadi medan produksi makna, kontrol sosial, dan ekspresi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer (Surahman, 2024).

### **2.3.1 Kompas.com sebagai Media Arus Utama**

Kompas.com merupakan portal berita daring yang menjadi bagian dari Kompas Gramedia Group, salah satu kelompok media terbesar di Indonesia. Berangkat dari koran Kompas yang didirikan pada tahun 1965, Kompas.com diluncurkan secara resmi pada 14 September 1995 dan menjadi pelopor media digital di tanah air. Sebagai media arus utama, Kompas.com dikenal mengedepankan prinsip jurnalisme moderat, faktual, dan berimbang, serta memiliki fokus pada pemberitaan politik, ekonomi, pendidikan, dan peristiwa aktual lainnya.

Kompas.com menempati posisi strategis sebagai sumber berita terpercaya, yang menyasar kelas menengah dan kalangan profesional urban. Pemberitaannya Kompas.com cenderung mengusung pendekatan informatif dan netral, meskipun dalam praktiknya tetap memiliki framing tersendiri yang dapat mencerminkan kepentingan institusional atau posisi ideologis tertentu. Beberapa studi menunjukkan bahwa Kompas.com kerap menampilkan narasi yang mendukung stabilitas dan

kontinuitas kekuasaan, namun tetap memberi ruang bagi kritik terhadap kebijakan publik. Keberadaannya di berbagai platform digital menjadikan Kompas.com sebagai aktor penting dalam pembentukan opini publik di era media daring yang semakin cepat dan kompetitif.

### **2.3.2 Tempo.co sebagai Media Investigatif dan Kritis**

Tempo.co adalah portal berita digital yang dikelola oleh PT Tempo Inti Media, bagian dari kelompok media Tempo yang telah dikenal sejak era Orde Baru sebagai media yang kritis dan independen. Didirikan tahun 1971 oleh Goenawan Mohamad dan para jurnalis progresif lainnya, majalah Tempo menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap otoritarianisme melalui laporan-laporan investigatif yang tajam. Menurut Dhinanti et al. (2024) bahwa Tempo merupakan salah satu media massa populer di Indonesia, dimana media ini sering kali memberitakan topik mengenai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu Tempo juga dikenal dengan liputan investigatif secara mendalam dan independen, serta sering kali mengangkat isu-isu kebijakan politik dan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Versi daring Tempo.co meneruskan tradisi tersebut dengan menyajikan berita-berita eksklusif, opini tajam, dan laporan mendalam yang seringkali menyuarakan kepentingan publik dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Tempo dikenal memiliki gaya jurnalistik watchdog, yaitu berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan pengungkap penyimpangan kekuasaan. Secara umum, Tempo.co diposisikan sebagai media yang lebih progresif, idealis, dan

memiliki afiliasi yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemakzulan atau konflik politik, Tempo.co cenderung menampilkan narasi yang kritis terhadap elite kekuasaan dan menyoroti dinamika politik melalui pendekatan analitis dan investigatif. Framing yang dibentuk oleh Tempo.co kerap berbeda dengan media arus utama lainnya, karena lebih berani dalam mengangkat kontroversi dan menghadirkan sudut pandang alternatif.

### **2.3.3 Sindonews sebagai Media Populer Berbasis Digital**

Sindonews adalah portal berita digital yang dimiliki oleh MNC Group, salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia yang juga memiliki saluran televisi RCTI, MNC TV, dan iNews. Sindonews menyasar segmen pasar menengah ke bawah dengan model pemberitaan yang bersifat populer, cepat saji, dan berorientasi pada tren pembaca. Pemberitaan politik, Sindonews cenderung menampilkan framing yang tidak terlalu mendalam secara analitis, namun sangat responsif terhadap isu aktual yang tengah viral di masyarakat. Afiliasi Sindonews dengan MNC Group yang diketahui memiliki kedekatan politik dengan tokoh-tokoh tertentu juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai objektivitas dan framing berita yang dipublikasikannya. Meskipun Sindonews memiliki jangkauan pembaca yang luas, kontennya perlu dianalisis secara kritis terutama dalam isu-isu yang sarat muatan politik, seperti pemakzulan pejabat publik.

## 2.4. Pemakzulan

Pemakzulan, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai impeachment, adalah suatu prosedur konstitusional yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik, terutama dalam struktur pemerintahan eksekutif dan legislatif. Menurut (Prayitno, 2021b) pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi karena banyak ahli menganggap bahwa pemakzulan dianggap sebagai peristiwa politik yang luar biasa dalam sistem Presidensial. Sebagai mekanisme kontrol, pemakzulan merupakan bagian penting dari prinsip penyeimbang, dimana kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada pengawasan serta evaluasi oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut (Pulungan & ALW (2022) checks and balances antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif namun dikarenakan legitimasi kekuasaan eksekutif tidak berasal dari kekuasaan legislatif, maka perlu dibuat mekanisme agar kekuasaan legislatif tetap mempunyai kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Pemakzulan merepresentasikan upaya sistemik untuk menjaga integritas jabatan publik dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela yang mencederai kepercayaan public (Fikri, 2023). Menurut teori konstitusional klasik, sebagaimana dipaparkan oleh Alexander Hamilton dalam *The Federalist Papers*, pemakzulan berhubungan dengan

penyalahgunaan kewenangan publik sehingga mempengaruhi kepercayaan publik (Natashya et al., 2023).

Sejarah mencatat bahwa gagasan pemakzulan berakar dari praktik parlemen Inggris pada abad ke-14 yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh sistem hukum Amerika Serikat, dan berkembang di berbagai negara demokrasi modern, termasuk Indonesia. Mekanisme pemakzulan tidak semata-mata berlandaskan pada pelanggaran hukum, tetapi juga dapat muncul sebagai refleksi dari konflik politik antar elite kekuasaan. Kajian mengenai pemakzulan tidak bisa dilepaskan dari teori politik kekuasaan, dimana tokoh-tokoh seperti Niccolò Machiavelli dan Carl Schmitt menekankan bahwa politik adalah ranah pertarungan kepentingan dan dominasi, dimana hukum terkadang dijadikan alat untuk mencapai tujuan kekuasaan. Sistem presidensial seperti di Indonesia, proses pemakzulan diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen, yang memberikan hak kepada DPR untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dugaan pelanggaran berat terhadap hukum atau penyimpangan terhadap sumpah jabatan (Fikri, 2023).

Pemakzulan bisa terjadi di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan peran DPRD dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang menilai dan memutuskan pelanggaran oleh kepala daerah. Realisasinya, pemakzulan terhadap kepala daerah seringkali memiliki muatan politis yang kental. Menurut (Partamayasa, 2020) bahwa proses impeachment yang dilakukan DPRD,

hal ini berkaitan dengan kewenangan sebagai pengawas dalam kebijakan yang diambil pemerintah yakni kepala daerah. Banyak kepala daerah yang dimakzulkan bukan semata-mata karena pelanggaran hukum berat, melainkan karena kehilangan dukungan politik di DPRD, adanya konflik kepentingan antar partai, atau karena menentang arus kekuasaan pusat. Pemakzulan bisa menjadi instrumen hegemonik bagi kelompok dominan untuk mempertahankan status quo atau menyingkirkan pihak yang dianggap mengancam tatanan kekuasaan.

Pemakzulan juga sangat berkaitan erat dengan legitimasi kekuasaan. (Pratiwi et al., 2016) menjelaskan bahwa Max Weber dalam kerangka sosiologisnya membagi legitimasi kekuasaan menjadi tiga tipe: legal, tradisional, dan karismatik. Ketika seorang pemimpin kehilangan legitimasi baik secara moral, hukum, maupun sosial maka peluang pemakzulan akan semakin besar. Demokrasi elektoral, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui proses pemilu, tetapi juga harus dijaga melalui kinerja yang akuntabel dan kepatuhan terhadap etika jabatan. Jika kepercayaan publik terganggu, terutama akibat pemberitaan negatif atau skandal politik, maka tekanan politik terhadap pemakzulan akan meningkat. Media massa memegang peran penting dalam membentuk opini publik terkait isu pemakzulan. Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga agen framing yang mampu membentuk persepsi dan interpretasi publik terhadap perilaku pejabat public (Mamis et al., 2023).

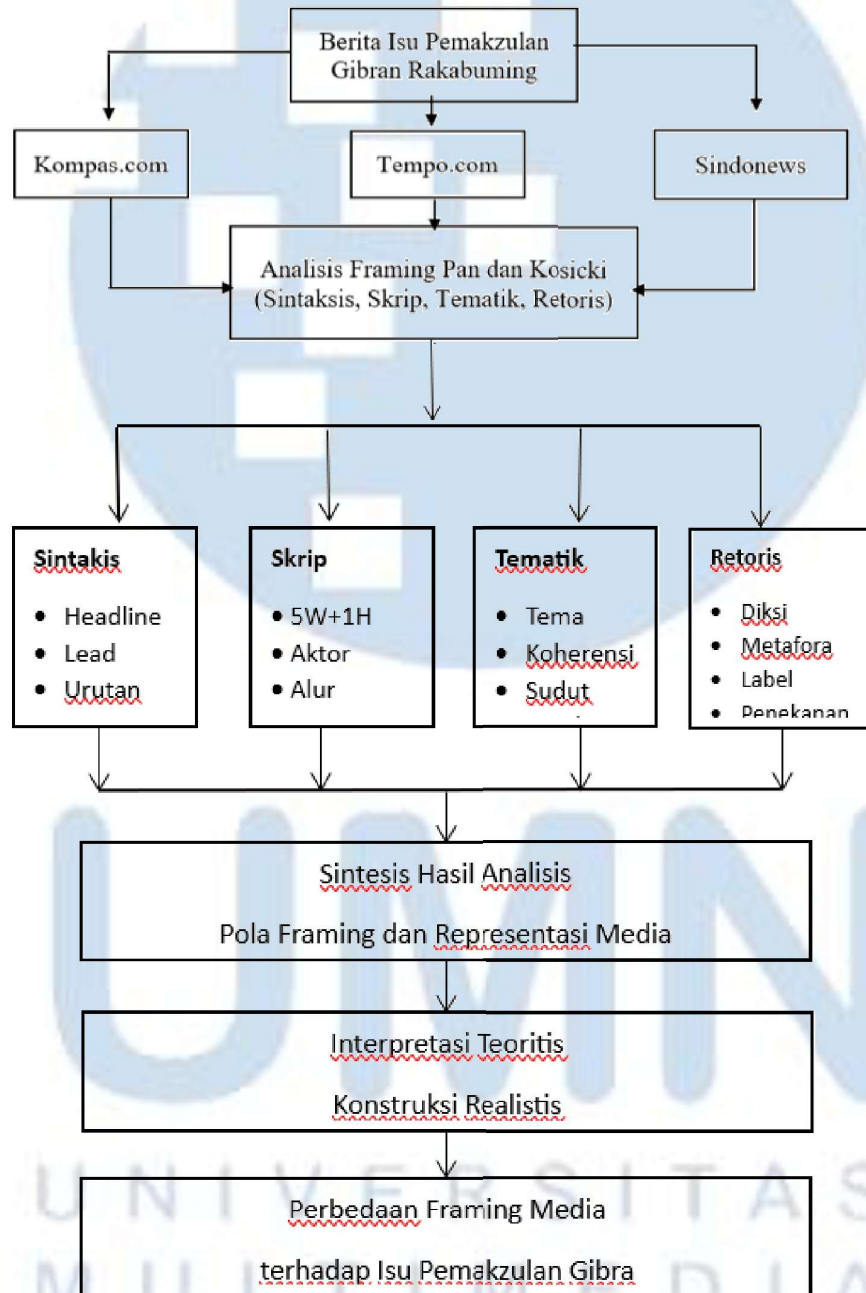
Pemakzulan adalah fenomena yang tidak bisa direduksi sekadar menjadi prosedur hukum. Ia adalah arena pertarungan narasi dan kepentingan antara aktor-

aktor politik yang bertarung untuk mempertahankan atau menggantikan kekuasaan. Memahami fenomena pemakzulan secara utuh, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum tata negara, teori politik, sosiologi kekuasaan, dan analisis wacana kritis (Candra et al., 2025). Kajian tentang pemakzulan membuka ruang bagi analisis yang mendalam mengenai bagaimana sistem demokrasi kita diuji oleh kekuatan politik, hukum, dan komunikasi publik yang saling berkelindan dalam arena kontestasi kekuasaan

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## 2.5 Alur Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pemikir